

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Kajian Partai Politik

##### 1. Pengertian Partai Politik

Miriam Budiarjo (2013, hlm 403) mengatakan bahwa partai politik sebagai berikut ;

“merupakan suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan umum”.

Pendapat di atas dapat ditunjang oleh Carl J. Friedrich dalam Miriam Budiarjo (2013, hlm 404) mengatakan bahwa partai politik adalah ;

“sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*)”.

Dari pendapat para ahli yang dikemukakan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa partai politik ialah sebagai wadah atau organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia dengan tujuan dan cita – cita yang sama, atas dasar kesadaran untuk mementingkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Uraian di atas diperkuat oleh kutipan di bawah ini.

Pendapat di atas di tunjang dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdas

arkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Definisi partai politik”.

Sigmund Neumann dalam Miriam Budiardjo (2008, hlm. 404) berasumsi bahwa partai politik ialah ;

“organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*A political party is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with the other group or groups holding divergent views*)”.

Berdasarkan teori-teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa Partai politik merupakan organisasi politik yang memiliki ideologi dan cita-cita tertentu yang ingin diraih secara bersama-sama dan memiliki tujuan untuk merebut dan atau mempertahankan kekuasaan dengan cara bersaing dalam pemilu untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*).

## 2. Fungsi Partai Politik

Secara umum, partai politik memiliki fungsi yaitu: sarana komunikasi politik, sarana pemadu kepentingan, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana pengendali konflik, sarana partisipasi politik, dan sebagai sarana kontrol politik. Hal ini sebagai mana dikemukakan Ramlan Surbakti ( 2010. Hlm. 149 ) sebagai berikut:

### a. Sarana komunikasi politik.

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik di negara totaliter tetapi

juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Dalam melaksanakan fungsi ini, partai politik tidak begitu saja menyampaikan segala tuntutan masyarakat kepada pemerintah, tetapi dirumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Jadi dapat dikatakan bahwa partai politik berfungsi untuk mengefektifkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

b. Sarana pepadu kepentingan.

Keadaan masyarakat modern yang semakin luas dan kompleks membuat banyak ragam pendapat dan aspirasi semakin berkembang. Masing – masing kelompok tentu memiliki banyak keragaman pendapat, sehingga perlu adanya suatu proses yang dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Setelah digabungkan, pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Agregasi dan artikulasi kepentingan itulah salah satu fungsi dalam komunikasi partai politik. Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usul kebijakan dan memasukkannya dalam program atau *platform* partai untuk diperjuangkan dalam parlemen agar dijadikan sebagai kebijakan umum. Disisi lain, partai politik juga berfungsi memperbicangkan dan menyebarluaskan rencana dan kebijakan pemerintah. Dalam hal tersebut, partai politik memerankan sebagai penghubung antara yang memerintah dan diperintah.

c. Sarana sosialisasi politik.

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat agar masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja (melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal) maupun tidak sengaja (melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan atau masyarakat). Metode sosialisasi politik dibagi menjadi dua, yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, masyarakat mengenal dan mempelajari norma-norma, nilai-nilai, symbol – symbol politik negaranya dalam sistem

politik, seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai-nilai, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai hal yang baik dan ideal. Indoktrinasi politik biasa dilakukan di negara dengan sistem totaliter.

d. Sarana rekrutmen politik.

Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya pada negara yang menganut sistem politik totaliter dengan partai politik tunggal atau manakala partai politik ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting untuk keberlangsungan sebuah sistem politik.

e. Sarana pengendali konflik.

Dalam negara demokrasi, setiap warga negara berhak menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi maupun kepentingannya sehingga konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat terelakkan. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

f. Sarana partisipasi politik.

Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, mendukung dan menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini,

partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik.

g. Sarana kontrol politik.

Kontrol politik merupakan kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melakukan suatu kontrol politik harus ada tolok ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif objektif. Tolak ukur yang dimaksud adalah berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan kedalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan dari kontrol politik yaitu meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang sehingga kebijakan dan pelaksanaannya dapat sesuai dengan tolok ukur tersebut. Dalam fungsi kontrol, partai politik harus menggunakan tolok ukur yang merupakan kesepakatan bersama sehingga seharusnya menjadi pegangan bersama.

Partai politik antara lain berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, penciptaan suasana yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, sarana ikut serta berpartisipasi dalam politik warga negara Indonesia, dan sebagainya.

Menurut Miriam Budiardjo (2001, hlm. 44) Fungsi partai politik terbagi menjadi enam, ialah :

1) Komunikasi politik.

Arus informasi dalam suatu Negara bersifat dua arah artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dan disinilah kedudukan parpol dalam arus ini sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah” (*the rulers*) dengan “mereka yang diperintah” (*the Ruled*).

2) Artikulasi kepentingan.

Di dalam suatu masyarakat modern, apa lagi yang luas wilayahnya, pendapatan dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas apabila tidak ditampung dan disalurkan, pendapat dan sikap yang bermacam-

macam itu perlu diolah dan dirumuskan, proses merumuskan kepentingan-kepentingan ini dinamakan artikulasi kepentingan

### 3) Agregasi kepentingan.

Sikap - sikap dan tuntutan-tuntutan dari berbagai-bagai kelompok yang sedikit-banyak menyangkut hal yang sama digabung menjadi satu, proses penggabungan ini dinamakan agregasi kepentingan. Artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan dalam suatu system politik merupakan input yang disampaikan kepada instansi yang berwenang membuat keputusan yang mengikat, dalam hal ini dewan perwakilan rakyat, pemerintah dsb, untuk diolah atau di-"konversi" menjadi output dalam bentuk UU, kebijakan umum, dll, hal ini dikenal dengan program partai.

### 4) Sosialisasi politik.

Proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat di mana ia berada, proses itu juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

### 5) Rekrutmen politik.

Proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

### 6) Pengatur konflik.

Dalam Negara demokratis yang masyarakatnya bersifat terbuka dan adanya perbedaan dan persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. Tetapi dalam masyarakat yang sangat heterogen sifatnya maka perbedaan pendapat ini, apakah ia berdasarkan perbedaan etnis, status, sosial ekonomi atau agama, mudah sekali mengundang konflik. Pertikaian-pertikaian semacam ini dapat diatasi dengan bantuan parpol; sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa, sehingga akibat-akibat negatifnya minimal mungkin. Namun di pihak lain, dilihat sering kali partai malahan mempertajam pertentangan yang ada.

Berdasarkan kenyataannya, tidak semua fungsi partai politik dilaksanakan dalam porsi dan tingkat keberhasilan yang sama. Hal ini tidak hanya bergantung pada sistem politiknya, akan tetapi juga dapat dipengaruhi faktor lain, seperti tingkat dukungan yang diberikan anggota masyarakat terhadap partai politik

(berakar atau tidaknya partai dalam masyarakat), kemampuan adaptasi, kompleksitas organisasi, otonomi, dan kesatuannya.

### **3. Kader dan Kaderisasi dalam Partai Politik**

#### **1) Pengertian Kaderisasi**

Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah organisasi, karena merupakan inti dari kelanjutan perjuangan organisasi ke depan. Tanpa kaderisasi, rasanya sangat sulit dibayangkan sebuah organisasi dapat bergerak dan melakukan tugas-tugas keorganisasiannya dengan baik dan dinamis. Kaderisasi adalah sebuah keniscayaan mutlak membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Fungsi dari kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon (*embrio*) yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Kader suatu organisasi adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga dia memiliki kemampuan yang di atas rata-rata orang umum. Bung Hatta pernah menyatakan kaderisasi dalam kerangka kebangsaan, yaitu; “bahwa kaderisasi sama artinya dengan menanam bibit. Untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan, pemimpin pada masanya harus menanam”.

Dari sini, pandangan umum mengenai kaderisasi suatu organisasi dapat dipetakan menjadi dua ikon secara umum. Pertama, pelaku kaderisasi (subyek). Dan kedua, sasaran kaderisasi (obyek). Untuk yang pertama, subyek atau pelaku kaderisasi sebuah organisasi adalah individu atau sekelompok orang yang dipersonifikasikan dalam sebuah organisasi dan kebijakan-kebijakannya yang melakukan fungsi regenerasi dan kesinambungan tugas-tugas organisasi.

Sedangkan yang kedua adalah obyek dari kaderisasi, dengan pengertian lain adalah individu – individu yang dipersiapkan dan dilatih untuk meneruskan visi dan misi organisasi. Sifat sebagai subyek dan obyek dari proses kaderisasi ini sejatinya harus memenuhi beberapa fondasi dasar dalam pembentukan dan pembinaan kader – kader organisasi yang handal, cerdas dan matang secara intelektual dan psikologis.

Sebagai subyek atau pelaku, dalam pengertian yang lebih jelas adalah seorang pemimpin. Bagi Bung Hatta, kaderisasi sama artinya dengan edukasi, pendidikan! Pendidikan tidak harus selalu diartikan pendidikan formal, atau dalam istilah Hatta “sekolah – sekolahan”, melainkan dalam pengertian luas.

## 2) Peran Kader Dalam Kaderisasi

Menurut Syaiful Arifin dalam blognya (2017) mengasumsikan beberapa peran kaderisasi terdiri dari:

### a) Pewarisan nilai-nilai organisasi.

Pewarisan nilai – nilai organisasi yang baik proses transfer nilai adalah suatu proses untuk memindahkan sesuatu (Nilai) dari satu orang ke orang lain (definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia). Nilai-nilai ini bisa berupa hal-hal yang tertulis atau yang sudah tercantum dalam aturan-aturan organisasi (seperti Konsepsi, AD ART, dan aturan-aturan lainnya) maupun nilai yang tidak tertulis atau budaya-budaya baik yang terdapat dalam organisasi (Budaya diskusi) maupun kondisi-kondisi terbaru yang menjadi kebutuhan dan keharusan untuk ditransfer.

### b) Penjamin keberlangsungan organisasi.

Organisasi yang baik adalah organisasi yang mengalir, yang berarti dalam setiap keberjalanan waktu ada generasi yang pergi dan ada generasi yang datang (Tidak itu-itu aja, tidak mengandalkan *figuritas*). Keberlangsungan organisasi dapat dijamin dengan adanya sumber daya manusia yang menggerakkan, jika sumber daya manusia tersebut hilang maka dapat dipastikan bahwa organisasinya pun akan mati. Regenerasi berarti proses pergantian dari generasi lama ke generasi baru, yang termasuk di dalamnya adanya pembaruan semangat.

### c) Sarana belajar bagi kader.

Tempat di mana anggota mendapat pendidikan yang tidak didapat di bangku pendidikan formal. Pendidikan itu sendiri berarti proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam proses mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Pendidikan di sini mencakup dua hal yaitu pembentukan dan pengembangan. Pembentukan karena dalam kaderisasi terdapat *output – output* yang ingin dicapai, sehingga

setiap individu yang terlibat di dalam dibentuk karakternya sesuai dengan *output*. Pengembangan karena setiap individu yang terlibat di dalam tidak berangkat dari nol tetapi sudah memiliki karakter dan *skill* sendiri – sendiri yang terbentuk sejak kecil, kaderisasi memfasilitasi adanya proses pengembangan itu. Pendidikan yang dimaksudkan di sini terbagi dua yaitu dengan pengajaran (yang dalam lingkup kaderisasi lebih mengacu pada karakter) dan pelatihan (yang dalam lingkup kaderisasi lebih mengacu pada *skill*). Dengan menggunakan kata pendidikan, kaderisasi mengandung konsekuensi adanya perubahan sikap dan tata laku serta proses mendewasakan. Hal ini sangat terkait erat dengan proses yang akan dijalankan di tataran lapangan, bagaimana menciptakan kaderisasi yang intelek untuk mendekati kesempurnaan perubahan sikap dan tata laku serta pendewasaan.

Dari ketiga point peran kaderisasi diatas dapat disimpulkan bahwa, peran kaderisasi adalah suatu proses memindahkan nilai dari satu orang keorang lain. Dimana proses kaderisasi disini difasilitasi pendidikan yang mencakup dua hal yaitu pengajaran (pembentukan karakter) dan pelatihan (pengembangan *skill*) kader, sehingga menciptakan sumber daya manusia dan pembaruan semangat didalam organisasi yang ingin dicapai.

### **3) Fungsi Kader Dalam Kaderisasi**

Menurut Syaiful Arifin dalam blognya (2017) yaitu:

1. Melakukan rekrutmen anggota baru.

Penanaman awal nilai organisasi agar anggota baru bisa paham dan bergerak menuju tujuan organisasi. Menjalankan proses pembinaan, penjagaan, dan pengembangan anggota Membina anggota dalam setiap pergerakannya.

2. Menjaga anggota dalam nilai-nilai organisasi dan memastikan anggota tersebut masih sepaham dan setujuan.

Dengan cara mengembangkan *skill* dan *knowledge* anggota agar semakin kontributif.

3. Menyediakan sarana untuk pemberdayaan potensi anggota sekaligus sebagai pembinaan dan pengembangan aktif.

Adanya pemberdayaan kader sehingga kaderisasi akan sesuai dengan apa yang ingin dicapai.

4. Mengevaluasi dan melakukan mekanisme kontrol organisasi.

Kaderisasi bisa menjadi evaluator organisasi terhadap anggota. Sejauh mana nilai-nilai itu diterima anggota, bagaimana dampaknya, dan sebagainya. (untuk itu semua, diperlukan perencanaan sumber daya anggota sebelumnya)

Beberapa uraian diatas terkait dengan proses yang akan dijalankan dilapangan nantinya, serta akan berpengaruh terhadap organisasi yang baik dan menjamin keberlangsungan organisasi sehingga menciptakan kader yang diinginkan.

#### **4. Elektabilitas Partai Politik Di Masyarakat**

##### **a) Pengertian Elektabilitas**

Elektabilitas biasanya dipakai saat menjelang pemilihan umum, bisa diartikan sebagai tingkat keterpilihan yang sesuai dengan kriteria pilihan. Hal ini juga dikemukakan oleh Dendy Sugiono (2008, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* hlm. 29) sebagai berikut:

“Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer. Sedangkan popularitas adalah tingkat ketekanan di mata public. Meskipun populer belum tentu layak dipilih. Sebaliknya meskipun punya elektabilitas sehingga layak dipilih tapi karena tidak diketahui publik, maka rakyat tidak memilih. Untuk meningkatkan elektabilitas maka sangat tergantung pada teknik kampanye yang dipergunakan. Dalam masyarakat yang belum berkembang, kecocokan profesi tidak menjadi persoalan. Yang perlu diingat, tidak semua kampanye berhasil meningkatkan elektabilitas. Ada kampanye yang menyentuh, ada kampanye yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Sementara itu ada kampanye yang berkedok sebagai survei, dengan tujuan untuk mempengaruhi orang yang sulit membuat keputusan dan sekaligus mematahkan semangat lawan”.

Bisa disimpulkan bahwa elektabilitas tidak hanya tentang daya pilih yang tinggi, tetapi sesuai dengan kriteria pilihan masyarakat dan teknik kampanye yang digunakan akan mempengaruhi tingkat kriteria keterpilihan dan juga populer.

#### **b) Faktor Yang Meningkatkan Elektabilitas**

Secara umum elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer.

Adapun penjelasan peneliti terdahulu Nova Yolanda (2017) dengan judul fungsi dan peran kaderisasi dalam meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai politik di masyarakat menjelaskan bahwa untuk meningkatkan elektabilitas maka sangat tergantung pada teknik kampanye yang dipergunakan. Dalam masyarakat yang belum berkembang, kecocokan profesi tidak menjadi persoalan. Yang perlu diingat, tidak semua kampanye berhasil meningkatkan elektabilitas. Ada kampanye yang menyentuh, ada kampanye yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Sementara itu ada kampanye yang berkedok sebagai survei, dengan tujuan untuk mempengaruhi orang yang sulit membuat keputusan dan sekaligus mematahkan semangat lawan.

Dalam penelitian psikologi sosial telah ditemukan secara luas bahwa informasi mengenai apa yang dilakukan sebagian besar orang mampu mempengaruhi perilaku individu. Salah satu teori yang sering digunakan adalah *bandwagon effect*. Teori ini berpendangan bahwa individu cenderung mengikuti apa yang dipikirkan dan dilakukan orang lain. Contoh sederhananya adalah orang berama-ramai mendengarkan musik grup band tertentu karena melihat atau mendengar banyak orang mendengarkan musik tersebut. Tidak hanya bermanfaat bagi target, *bandwagon effect* juga bermanfaat bagi pelaku karena dapat menjadi *self fulfilling prophecy* (sebuah prediksi yang secara langsung atau tidak dapat

menjadi benar). Keterpilihan seorang kandidat calon Presiden dipengaruhi oleh Perilaku Pemilih. Sesungguhnya untuk melihat perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politik mereka terhadap Calon Presiden maupun Calon Legislatif dapat dipahami dengan beberapa pendekatan. Dekade 1950an, voting behaviorial ini didasarkan pada melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis yang dikembangkan oleh mahzab Colombia (Colombia School of electoral behaviorial) dan mahzab psikologis yang dikembangkan oleh mahzab Michigan (The Michigan Survey Center).

Pendekatan sosiologis ini melihat perilaku memilih dipengaruhi oleh segala kegiatan yang berkonteks sosial. Menurut Afan Gafar (1992 hlm 5), pendekatan sosiologis ini melihat tingkah laku pemilih dipengaruhi oleh jenis kelamin, status sosial, lingkungan keluarga, kelompok belajar, teman sepermainan dan juga kepercayaan seseorang. Namun menurutnya analisis mengenai organisasi formal yang diikuti oleh pemilih juga perlu diperhatikan, misalnya serikat buruh, kelompok pengajian dan sebagainya. Intinya, pendekatan sosiologis ini berasumsi bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh status ekonomi, kelas sosial, agama dan ideologi. Pendekatan psikologis lahir akibat adanya kelemahan dari pendekatan sosiologis. Menurut pendekatan ini, attitude seseorang juga berpengaruh dalam melihat perilaku pemilih. Menurut Dennis Kanvanagh pendekatan perilaku pemilih terdapat lima pendekatan, yaitu pendekatan struktural, sosiologis, ekologis, psikologis sosial dan pilihan rasional. Pada pendekatan sosiologis didasarkan pada mobilitas seseorang yang ingin keluar dari kelompok untuk bergabung dengan kelompok lain yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi, demografi, tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan. Pendekatan struktural didasarkan pada struktur yang dibangun, artinya pemilih melihat partai politik dari struktur sosial masyarakat, sistem kepartaian dan program yang ditonjolkan partai.

Pendekatan ekologis didasarkan pada unit teritorial. Kelompok masyarakat penganut agama, buruh, kelas menengah, suku bangsa (etnis) yang bertempat tinggal di daerah tertentu dapat mempengaruhi perubahan komposisi pemilih terhadap pilihan mereka. Pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) adalah pendekatan yang melihat adanya perhitungan untung rugi dalam melihat perilaku pemilih. Di sini faktor pendidikan dan kesadaran pemilih sangat berpengaru

h. Pendekatan ini dimotori oleh Anthoni Down (1957) yang menyatakan bahwa pemilih bukannya wayang yang tidak memiliki kehendak bebas dari dalangnya dan orientasi pemilih dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu:

- a) Faktor eksternal: Orientasi isu-isu yang berpusat pada pemecahan persoalan yang dihadapi masyarakat dan diangkat menjadi visi, misi, tujuan serta kebijakan program kerja.
- b) Faktor internal: figur dan karakter kandidat melalui pembentukan image berupa citra, reputasi dan kredibilitas tanpa memperhatikan label partainya.

### c) Pengertian Masyarakat

Masyarakat ialah kelompok orang yang memiliki hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang berada diwilayah tertentu dan terikat oleh aturan atau hukum yang berlaku. Begitupun Robert M. McIver dalam Miriam Budiardjo (2010, hlm 46) mengatakan bahwa: “Masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata (*Society means a system of ordered relations*)”.

Pendapat di atas dapat diperkuat oleh Robert Dahl dalam Ramlan Surbakti (2010, hlm 26) mengemukakan bahwa:

“Partai politik merupakan keputusan yang mengikat seluruh masyarakat. Keputusan yang hanya mengikat, menyangkut, dan memengaruhi sebagian masyarakat – setidaknya-tidaknya secara normatif – tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan politik”.

Di dalam kehidupan berkelompok dan hubungannya dengan manusia yang lain, pada dasarnya setiap manusia menginginkan beberapa nilai. Dalam mengamati masyarakat di sekelilingnya, yaitu masyarakat Barat, Harold Laswell dalam Miriam Budiardjo (2010, hlm 47) merinci delapan nilai, yaitu: (1) Kekuasaan (*power*), (2) Kekayaan (*wealth*), (3) Penghormatan (*respect*), (4) Kesehatan (*well-being*), (5) Kejujuran (*rectitude*), (6) Keterampilan (*skill*), (7) Pendidikan/Penerangan (*enlightenment*), (8) Kasih sayang (*affection*). Dengan adanya berbagai nilai dan kebutuhan yang harus dilayani itu, maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus.

Dalam hal ini dapat disimpulkan dari teori diatas bahwa masyarakat sangat berperan penting dalam kehidupan berpolitik yang dilakukan melalui berbagai macam organisasi dengan tujuan dan cita-cita yang sama serta bersifat lokal nasional.

#### **4) Partai Golkar**

##### **a. Sejarah Singkat Partai Golkar**

Sejarah Partai Golongan Karya (GOLKAR) bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekretariat Bersama (SEKBER) GOLKAR di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. SEKBER GOLKAR didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (SEKBER GOLKAR). SEKBER GOLKAR didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. SEKBER GOLKAR ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang semakin meningkat. SEKBER GOLKAR ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama SEKBER GOLKAR adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Bulan Desember Tahun 1965. Jumlah anggota SEKBER GOLKAR ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota SEKBER GOLKAR dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional SEKBER GOLKAR adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam SEKBER GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

- 1) Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
- 2) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)

- 3) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
- 4) Organisasi Profesi
- 5) Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
- 6) Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
- 7) Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971

Ke- 7 (tujuh) KINO yang merupakan kekuatan inti dari SEKBER GOLKAR tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

## **B. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik Dalam Masyarakat**

### **1. Pendidikan Politik Dalam Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga ditunjang oleh Cogan dalam Sunatra (2016, hlm 80) yaitu :

*“Civic Education sebagai the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives, atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang di rancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya”.*

Adapun penulis menambahkan bahwa pendidikan politik ialah belajar tentang kehidupan bermasyarakat yang sifatnya mengikat pada suatu aturan sehingga membentuk warga negara yang baik

Pendapat di atas dapat ditunjang dengan pendapat Somantri dalam Sunatra (2016, hlm 83) mengemukakan:

*“Pada saat itu, mata pelajaran Civics atau Kewarganegaraan, pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa Bangsa”.*

Adapun tujuan *civic education* adalah berpartisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal, maupun nasional. Hasilnya adalah dalam masyarakat demokratis kemungkinan mengadakan perubahan sosial akan selalu ada, jika warganegaraanya mempunyai pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk mewujudkannya.

## **2. Tujuan dan Arah Pendidikan Politik Bagi Masyarakat**

Tujuan politik di setiap negara berbeda-beda, karena landasan serta tujuan pelaksanaan pendidikan politik disesuaikan dengan dasar dan falsafah bangsanya. Di Indonesia proses pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan, maka tujuan pendidikan politik sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagai mana terdapat dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Adapun tujuan pendidikan politik menurut Kartini Kartono dalam Sunatra (2016, hlm 64) ialah :

“(1) Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, siswa, warga masyarakat, rakyat, dan seterusnya), mampu memahami situasi sosial-politik penuh konflik, berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap, aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu/atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama. (2) Memperhatikan dan mengupayakan peranan insani dari setiap individu sebagai warganegara (melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya). Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik). Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, pengembangan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara”.

Pendidikan politik diarahkan untuk menciptakan generasi muda yang melek politik merupakan upaya pembangunan politik untuk mengenal, mengetahui dan memahami sistem politik yang berjalan serta nilai-nilai politik tertentu yang akan mempengaruhi perilaku warga negara.

### C. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian mengenai kaderisasi Partai Politik dan untuk menunjang penelitian, penulis melakukan tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Joko Susanto yang berjudul PERANAN KADERISASI DALAM MENINGKATKAN ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa :
  - a) Proses kaderisasi yang dijalankan DPC Partai Gerindra Kota Bandung yaitu DPC hanya mengikuti intruksi DPP yang sudah dijalankan pengkaderan lewat pendidikan di hambalang dalam artian proses kaderisasi Partai Gerindra masih menganut sistem sentralisasi. DPC juga melakukan Kaderisasi dan pelatihan, kegiatanyapun dihadiri oleh pengurus DPC, PAC, Ranting dan sayap partai. Sehingga para kader di DPC Kota Bandung akan memiliki pengetahuan dan wawasan pendidikan politik yang luas, maka dari itu Elektabilitas partai Gerindra akan naik bilamana memunyai kader yang berkualitas.
  - b) Kendala kaderisasi DPC Partai Gerindra Kota Bandung yaitu masih banyak anggota belum sepenuhnya aktif dalam kegiatan partai sehingga terkesan hanya menumpang nama dan sekedar mendapatkan kartu tanda anggota lalu berdampak pada kinerja Partai Gerindra secara keseluruhan. Dan dari SDM dari segi Intelegualitas dalam artian kurang pengetahuan tentang pendidikan politik dan wawasan kebangsaan.
  - c) Upaya DPC Partai Gerindra Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas kadernya agar sesuai dengan harapan masyarakat yaitu dengan cara mengadakan suatu program yang bersentuhan dengan masyarakat contohnya program pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan.
  - d) Kriteria keberhasilan dari pola Kaderisasi yang diterapkan di DPC Kota Bandung untuk meningkatkan Elektabilitas Partai Gerindra yaitu bahwa Dikatan proses kaderisasi berhasil apabila mampu mengangkat elektabilitas partai itu sendiri, contohnya memenangkan Ridwan Kamil dalam Pemilihan Walikota Bandung yang di usung oleh Partai Gerindra Kota Bandung, selain

itu ada peningkatan kursi DPRD Kota Bandung yang tadinya 3 Kursi menjadi 7 kursi. Kata kunci: Kaderisasi, Elektabilitas dan Partai Politik.

2. Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Wengki Saputra pada tahun 2012 dengan judul POLA REKRUITMEN PARTAI POLITIK DALAM MENETAPKAN CALEG DALAM PEMILU LEGISLATIF, dengan hasil penelitian ini berdasarkan 3 indikator pola rekrutmen partai politik yaitu:
  - a) Penyediaan rekrutmen politik terhadap Caleg, partai politik menyediakan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mencalonkan diri.
  - b) Kriteria rekrutmen politik pemimpin, syarat/ kriteria Caleg oleh Partai partai politit. Ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi oleh Caleg, seperti pendidikan masih banyak yang belum S1, popularitas, akseptabilitas dan kapabilitas belum terpenuhi.
  - c) Kontrol rekrutmen politik dilakukan pada bakal calon Legislatif dari internal dan eksternal partai. Ada beberapa kendala yang dihadapi partai politik dalam merekrut Caleg, antara lain banyak Balon yang meminta nomor urut kecil, meminta Dapil, dan black campaign. Maka diasumsikan bahwa setiap partai politik memiliki dan menerapkan pola kaderisasi yang berbeda-beda yang turut menentukan kualitas para kadernya terhadap elektabilitas partai politiknya. Apabila masing- masing partai memahami dan menyadari bahwa tugas, peran, dan fungsi mereka sangat mempengaruhi elektabilitas partainya dengan adanya kaderisasi yang berkualitas.
  
3. Mariatus Sholiha (2008) melakukan penelitian tentang SISTEM KADERISASI PARTAI POLITIK (Studi Kasus pada Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan (DPC PDI-P) Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa secara kesejarahan PDI adalah hasil fusi yang berunsur dari PNI, IPKI, MURBA, PARKINDO dan Partai Katolik pada tanggal 10 Januari 1973. Kemudian PDI berganti nama menjadi PDI Perjuangan dan dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999 di Istanor Senayan Jakarta.

Untuk mewujudkan cita-citanya, PDI Perjuangan melakukan kongres di Semarang pada tanggal 27 Maret-1 April 2000 untuk menetapkan dan mengesahkan Anggaran dasar/anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, sistem kaderisasi yang digunakan PDI Perjuangan adalah stelsel aktif yaitu suatu sistem yang menerapkan bahwa setiap orang yang ingin menjadi kader partai harus aktif, Implementasi sistem kaderisasi PDI Perjuangan Kota Malang adalah melalui empat proses yaitu: penarikan (rekrutmen), proses seleksi, pendidikan politik, pengembangan, langkah-langkah PDI Perjuangan untuk mengembangkan kader yang profesional adalah pertama, langkah yang dilakukan adalah memberikan beberapa persyaratan kepada para kader diantaranya adalah persyaratan obyektif meliputi: Pemahaman maksudnya ialah pemahaman siapa dan bagaimana kelompok sasaran, Kemampuan berkomunikasi.

Persyaratan subyektif kader meliputi: kepribadian/moral, idealisme dan komitmen, tingkat percaya diri, Kondisi emosional. Kedua, Langkah yang dilakukan adalah pembinaan kader dengan tujuan untuk terbentuknya kader-kader pelopor yang siap dan sanggup menjadi top leaders dengan bekal teori, mental dan watak progressif revolusioner sehingga benar-benar menjadi kader yang berkualitas dan professional. Bentuk pembinaannya adalah diskusi politik yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali.

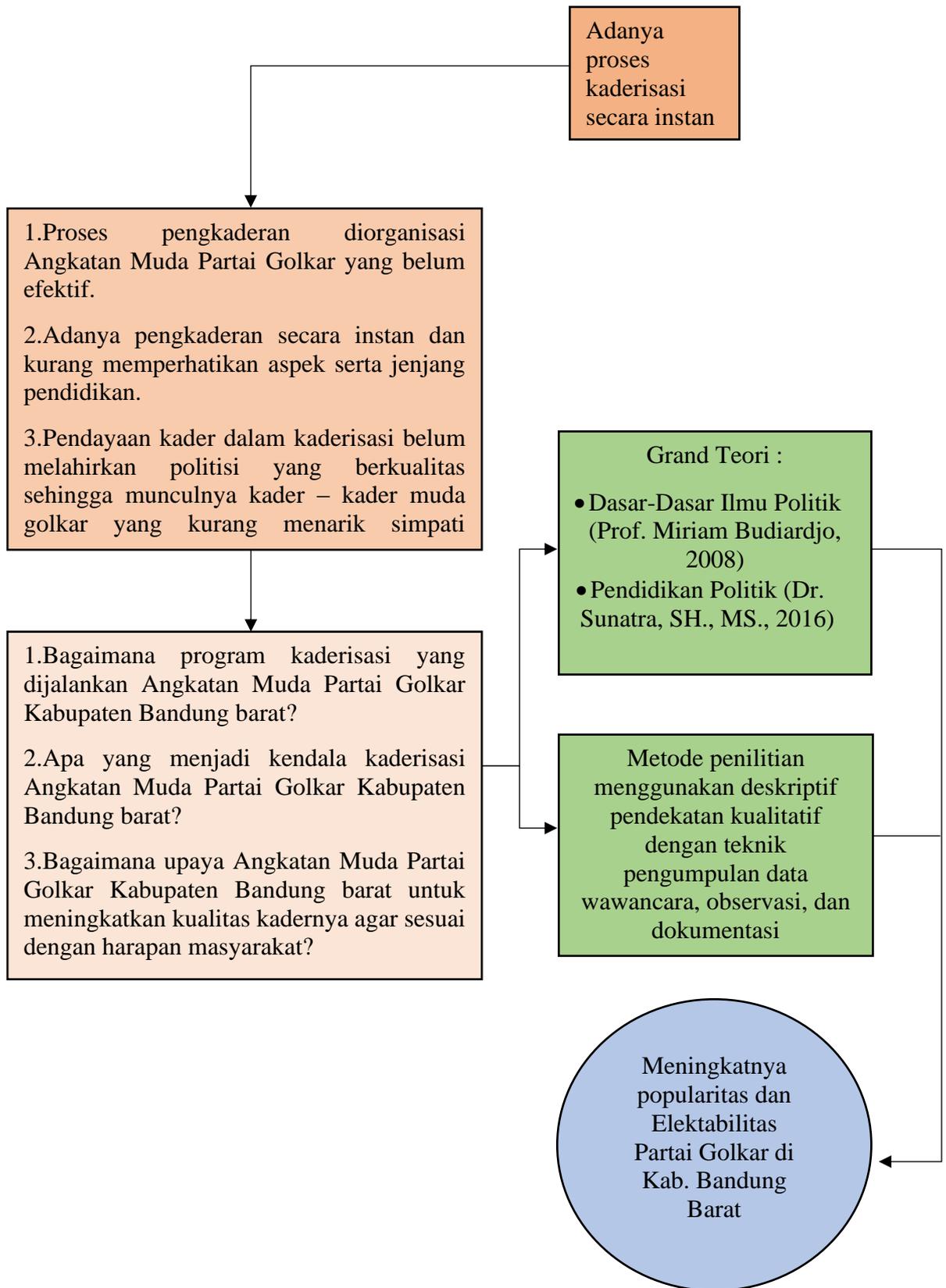
Berkaitan dengan tiga penelitian terdahulu tersebut, penulis coba membandingkan dengan temuan penulis sendiri. Jika di penelitian terdahulu belum menunjukkan metode teknis dengan indikator-indikator yang kurang jelas maka penulis akan menggunakan modul pengkaderan yang terstruktur hingga ada indikator antara metode dan hasil kaderisasi.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Partai politik tidak bisa dilepaskan dengan proses Kaderisasi di dalamnya. Menurut Miriam Budiardjo, apabila partai memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas, maka partai tersebut akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Hal tersebut menjadi sangat penting karena dengan memiliki kader yang baik, maka partai tersebut tidak akan kesulitan dalam

menentukan pemimpinnya sendiri dan memiliki peluang untuk mengajukan calon ke bursa kepemimpinan nasional. Selain itu, kaderisasi politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam Kaderisasi politik, antara lain melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lainnya.

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dikembangkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar: 2.1 Kerangka Pemikiran**